

PPH BADAN YANG DIPENGARUHI OLEH PENDAPATAN DAN DER PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI DI BEI

Denny Novi Satria
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP
 dennynovisatria@akbp.ac.id

ABSTRACT

Paying taxes is one of the obligations that must be carried out by every company that has met the requirements as a taxpayer. If viewed from the reporting side, the tax payment will be referred to as a profit deduction. The amount of tax depends on income earned. In addition, the debt to equity ratio can be used as a basis for decision making in the use of debt, with the interest expense on debt, it can be a deduction for income, which causes the company's taxable profit to be low and will later reduce the amount of income tax owed itself. So that the purpose of this study is to see the effect of the ratio of income and debt to equity on corporate action tax in transportation sub-sector service companies on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The sampling technique used purposive sampling of 8 samples during 2016-2019. This research method is multiple linear regression analysis. The conclusion of this study shows (1) revenue affects to corporate income tax (2) debt to equity ratio does not affect to corporate income tax. The research results are expected to be a reference for companies to find out what factors can affect taxes.

Keywords: Revenue, Debt to Equity Ratio, Corporate Income Tax

ABSTRAK

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Jika ditinjau dari sisi laporan keuangan, pembayaran pajak akan dicatat sebagai pengurang laba perusahaan. Besaran pajak yang dibayarkan tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang didapat perusahaan. Selain itu, *debt to equity ratio* dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penggunaan hutang, dengan adanya beban bunga atas hutang maka dapat menjadi pengurang penghasilan, sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi rendah dan nantinya akan mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang itu sendiri. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan *debt to equity ratio* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa sub sektor transportasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 8 sampel perusahaan selama tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan (1) pendapatan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan (2) *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau rujukan khususnya bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan.

Kata kunci: Pendapatan, Debt to Equity Ratio, Pajak Penghasilan Badan

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara, dimana penggunaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional oleh pemerintah. Menteri Keuangan memaparkan bahwa penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) mencapai Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020. Kemudian Menteri Keuangan melanjutkan bahwa salah satu sektor yang berkontraksi yaitu sektor transportasi dan gudang sebesar 10,4%. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan pengguna jasa transportasi, akibat adanya penerapan PSBB pada masa pandemi covid-19, sebagian orang lebih memilih untuk tetap dirumah dengan *work from home* dan tidak berpergian dulu. Selain itu perusahaan transportasi juga tidak diperbolehkan beroperasi hingga status dinyatakan dalam kondisi aman. Hal tersebut menyebabkan penurunan angka penggunaan jasa transportasi dan berdampak pada pendapatan perusahaan transportasi itu sendiri (Kemenkeu, 2020). Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana dalam menghitung pajak badan tidak lepas dari adanya dokumen pendukung dari laporan keuangan atau pembukuan. Setidaknya, dalam menghitung pajak penghasilan badan harus ada penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang dan lainnya.

Pendapatan kerap dianggap sebagai penghasilan yang timbul dari sebuah aktivitas perusahaan yang biasa disebut dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaan itu sendiri, misalnya seperti: penjualan (*sales*), penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa (IAI, 2009). Dalam perusahaan jasa transportasi sendiri pendapatan berasal dari jasa yang diberikan kepada konsumen. Karena pendapatan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan, maka jumlah pajak penghasilan yang dibayar akan bergantung dari besar kecilnya pendapatan itu sendiri.

Selain pendapatan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak, rasio hutang juga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya penggunaan hutang oleh perusahaan maka secara langsung akan memunculkan beban bunga yang harus dibayarkan secara periodik baik kepada kreditur maupun investor. Peraturan perpajakan memberlakukan beban bunga sebagai bagian dari beban usaha. Oleh karena itu semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutang akan menjadi kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa beban bunga dapat dijadikan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. Rasio hutang yang bisa digunakan sebagai prediktor yaitu *Debt to Equity Ratio* (Azhari, 2015).

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara jumlah hutang dan modal yang digunakan dalam perhitungan pajak. Kemudian, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Perbandingan hutang dan modal setinggi-tingginya empat banding satu (4:1). Di satu sisi dengan adanya hutang dapat membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya, namun jika hutang tersebut melebihi modal yang dimiliki maka tentu saja risiko kerugian perusahaan akan semakin tinggi. Sehingga perusahaan tidak dikenakan pajak penghasilan badan akibat kerugian tersebut dan kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya (Rafinska, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan terhadap pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Dharmayanti (2018) mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wagini, et al. (2019) mengemukakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Vindasari (2019) mengatakan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* berpengaruh

terhadap pajak penghasilan badan terutang. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, et al. (2019) mengemukakan bahwa variabel struktur modal yang diprosikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Kusufiyah (2020) mengatakan bahwa variabel *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) mengemukakan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan merupakan pemungutan resmi yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk dan nama apapun (Vindasari, 2019). Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan badan suatu perusahaan, maka perlu dilakukan yang namanya koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial (Augustien, 2017).

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, untuk menghitung pajak penghasilan badan bisa dilakukan dengan beberapa opsi. Opsi yang pertama, yaitu memilih perhitungan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki pembukuan atau pencatatan, penghasilan kena pajak yaitu pendapatan bruto dikalikan dengan tarif pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Kemudian opsi kedua, yaitu apabila badan usaha tersebut telah melakukan pembukuan dan pencatatan lengkap maka badan usaha tersebut wajib menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan pendapatan neto fiskal dikalikan tarif pajak penghasilan badan. Untuk yang memilih kedua opsi tersebut apabila pendapatan brutonya antara Rp 4,8 miliar s/d Rp 50 miliar maka akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 25% dan apabila peredaran brutonya melebihi Rp 50 miliar maka tidak akan dikenakan pengurangan tarif dan tarif pajaknya tunggal sebesar 25%. Berbeda dengan opsi yang terakhir yaitu, wajib pajak badan yang memiliki pendapatan bruto dibawah Rp 4,8 miliar berhak mendapatkan tarif pajak final sebesar 0,5% sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 (Republik Indonesia, 2008).

2. Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 paragraf 6 mengartikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, 2009). Sedangkan menurut Tuanakotta (2015) pendapatan didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan yang terjadi dari proses penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Umumnya pendapatan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter (uang).

3. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2012) *Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang. Sedangkan menurut Gitman & Zutter (2015) mengartikan *Debt to Equity Ratio* sebagai rasio untuk mengukur proporsi dari kewajiban dan ekuitas dalam membiayai aset perusahaan.

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan

Apabila pendapatan suatu perusahaan mengalami kenaikan, maka secara otomatis beban pajaknya pun ikut mengalami kenaikan. Kondisi seperti ini sangat disukai oleh pihak manajemen, dengan demikian manajemen pasti akan mempertahankan kinerja tersebut dengan berbagai cara agar pendapatan yang dihasilkan terus meningkat, walaupun diikuti dengan kenaikan beban pajak yang nantinya bisa diminimalisir dengan manajemen pajak (Dharmayanti, 2018).

Menurut Anjani (2015) bahwa semakin besar pendapatan usaha yang didapat perusahaan, maka akan semakin besar pula laba yang didapat oleh perusahaan. Dengan demikian pajak penghasilan yang didapat oleh perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Hal ini karena pendapatan dapat memiliki pengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan yang didapat.

Adapun menurut Wagini, et al. (2019) bahwa dengan tingginya tingkat pendapatan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik. Dimana perusahaan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang dia miliki dalam aktivitasnya guna mencapai laba yang besar. Besarnya laba tentu dimulai dengan besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Semakin besarnya pendapatan tentu akan berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wagini, et al. (2019), Dharmayanti (2018), dan Augustine (2017) yang menemukan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan

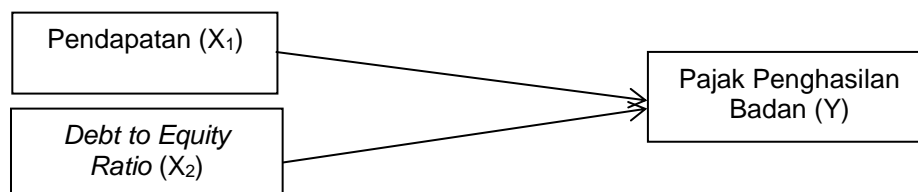
Debt to Equity Ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas. Rasio ini bisa dihitung dengan cara membandingkan antara total utang, termasuk didalamnya utang lancar dan tidak lancar dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini juga berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* maka akan semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang (Angraini & Kusufiyah, 2020).

Kreditor lebih menyukai rasio utang yang rendah sebab dengan semakin rendahnya rasio ini maka akan semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi. Namun, disisi lain pemegang saham mungkin menginginkan rasio ini lebih tinggi karena akan memperbesar laba yang diharapkan nantinya (Hery, 2016).

Dalam peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia membedakan perlakuan beban bunga pinjaman dengan pengeluaran dividen, bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2000 beban bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai beban (*tax deductible*), sedangkan pengeluaran dividen sendiri tidak dapat dikurangkan sebagai beban (*non-tax deductible*) (Azhari, 2015). Sehingga adanya pendanaan dari utang maka akan timbul yang namanya beban bunga pinjaman yang dapat dijadikan sebagai pengurang besaran pajak penghasilan.

Rasionalisasi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Angraini & Kusufiyah (2020), Vindasari (2019), dan Sholihah, et al. (2019) yang menemukan bahwa *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik suatu kerangka pemikiran dengan bagan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Paradigma Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan paradigma diatas maka dapat diambil kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: Pendapatan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan

H2: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan, *Debt to Equity Ratio* dan pajak penghasilan badan. Sedangkan metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verivikatif dengan pendekatan kuantitatif.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019. Sumber data diperoleh dari mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 45 perusahaan. Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik pengumpulan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2019.
2. Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyampaikan data laporan keuangan secara lengkap tahun 2016-2019.
3. Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah dalam menyampaikan laporan keuangan.
4. Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2019.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan variabel yang dapat operasionalisasikan atau diukur dengan menggunakan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Lebih jelasnya berikut ini adalah operasionalisasi variabel yang disajikan dalam tabel 1:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan (X_1)	Pendapatan = total pendapatan (Wagini et al., 2019)	Rasio
<i>Debt to Equity Ratio</i> (X_2)	<i>Debt to Equity Ratio</i> = $\frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}}$ (Kasmir, 2012:166)	Rasio
Pajak Penghasilan Badan (Y)	PPH Badan = pajak kini + pajak tangguhan perusahaan (Resmi, 2017)	Rasio

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS ver. 25). Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan. Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{PPHBDN} = \alpha + \beta_1 \text{PDPT} + \beta_2 \text{DER} + e$$

Keterangan:

PPHBDN	= pajak penghasilan badan
α	= konstanta
β	= koefisien regresi parsial
PDPT	= pendapatan
DER	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
e	= error

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel-variabel independen (pendapatan dan *Debt to Equity Ratio*) terhadap variabel dependen (pajak penghasilan badan). Menurut Ghozali (2018) cara melakukan uji F sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok
 - H_0 : berarti secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2 dengan Y
 - H_1 : berarti secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2 dengan Y
- 2) Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05)
- 3) Membandingkan tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria:
 - a) Nilai signifikan F < 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Nilai Signifikan F > 0,05 berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
- 4) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Adapun langkah dalam melakukan uji t menurut Ghozali (2018) adalah :

- 1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok
 - H_0 : berarti secara parsial atau individu tidak ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2 dengan Y
 - H_1 : berarti secara parsial atau individu ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2 dengan Y
- 2) Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5% (0,05)
- 3) Membandingkan tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria:
 - a) Nilai signifikan $t < 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Nilai Signifikan $t > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini artinya bahwa semua independen secara individu dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
- 4) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara individu dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara individu dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi *adjusted* (R^2) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Nilai *adjusted R square* yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sampel Penelitian

Sampel perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 yang di tentukan berdasarkan kriteria penentuan sampel, maka diperoleh sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	45
Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2019	(10)
Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek	(2)

Indonesia yang menyampaikan data laporan keuangan secara lengkap tahun 2016-2019	
Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menggunakan mata uang rupiah dalam menyampaikan laporan keuangan	(18)
Perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2019	(7)
Total Sampel	8
Total Data Observasi Tahun 2016-2019 (3 x 8)	32

2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji dengan jumlah data sebanyak 32 data observasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDPT (X_1)	32	25,35	29,20	27,5988	1,19698
DER (X_2)	32	0,08	2,62	1,0147	0,85740

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut.

- Variabel pendapatan pada tabel 3 diketahui memiliki nilai minimum sebesar 25,35, nilai maksimum sebesar 29,20 dan nilai rata-rata sebesar 27,59. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan perusahaan sub sektor transportasi masih terbilang tinggi karena belum menyentuh titik minus. Pendapatan tertinggi terjadi pada PT Blue Bird Tbk pada tahun 2016 dan nilai pendapatan terendah pada PT Ekasari Lorena Transport tahun 2018.
- Variabel *Debt to Equity Ratio* pada tabel 3 diketahui memiliki nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum sebesar 2,62 dan nilai rata-rata sebesar 1,01. Hal tersebut menandakan perusahaan sub sektor transportasi memiliki rasio hutang yang baik dan tergolong aman, karena jumlah hutangnya tidak mendekati jumlah modalnya. *Debt to Equity Ratio* tertinggi terjadi pada PT Adi Sarana Armada Tbk tahun 2019 dan *Debt to Equity Ratio* terendah pada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk Tahun 2017.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Jika nilai signifikansi > 0,05 berarti data residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Sig	Standar	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,200	> 0,05	Data berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai Unstandardized Residual dari *kolmogorov-smirnov* memiliki nilai Sig. > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada data residual regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika nilai VIF < 10 dan atau nilai Tolerance > 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics				Keterangan
	Tolerance	Std	VIF	Std	
PDPT	0,692	> 0,10	1,446	< 10	Tidak terjadi Multikolinieritas
DER	0,692	> 0,10	1,446	< 10	Tidak terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 4, nilai *tolerance* ke empat variabel > 0.10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas di dalam model regresi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Standar	Kesimpulan
PPHBDN	0,611	> 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
DER	0,882	> 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Sig. Antara variabel independen dengan absolute residual > 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

d) Uji Analisis Regresi Linier Berganda**1) Model Regresi**

Model Regresi digunakan untuk membuktikan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini hasil rangkuman analisis regresi linier berganda seperti pada tabel berikut:

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
(Constant)	-19,169
PDPT	1,561
DER	-0,220

$$\text{PPHBDN} = -19,169 + 1,561\text{PDPT} - 0,220\text{DER}$$

Dari hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai nilai konstan sebesar -19,169 dengan parameter negatif, menunjukkan bahwa jika variabel

pendapatan dan *Debt to Equity Ratio* diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka pajak penghasilan badan akan berkurang sebesar 19,169.

Pendapatan sebesar 1,561, menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan maka akan diikuti kenaikan pajak penghasilan badan sebesar 1,561. Kemudian *Debt to Equity Ratio* sebesar -0,220, berarti setiap kenaikan sebesar 1 satuan maka akan diikuti penurunan pajak penghasilan badan sebesar 0,220.

2) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen pendapatan dan *Debt to Equity Ratio* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan. Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F

Keterangan	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig	Std	Kesimpulan
Uji kelayakan model (Uji F)	56,835	3,32	0,00	< 0,05	Berpengaruh Simultan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($56,835 > 3,32$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara bersama-sama atau simultan variabel independen pendapatan dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap variabel dependen (pajak penghasilan badan)

3) Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi antara variabel independen yaitu pendapatan dan *Debt to Equity Ratio*, dengan variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Kriteria	Kesimpulan
PDPT	9,355	2,045	0,00	< 0,05	Diterima
DER	-0,944	2,045	0,35	< 0,05	Ditolak

- Pengaruh pendapatan terhadap pajak penghasilan badan
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,355 > 2,045$) dan signifikansi $< 0,05$ ($0,00 < 0,05$), artinya H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
- Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap pajak penghasilan badan
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,944 < 2,045$) dan signifikansi $> 0,05$ ($0,35 > 0,05$), artinya H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

4) Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai *adjusted R*² berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati angka satu dapat dikatakan model tersebut semakin baik. Hasil pengujian koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

<i>Adjusted R Square</i>	Kesimpulan
0,893	Variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen

Berdasarkan tabel 9, bahwa variabel dependen dalam hal ini pajak penghasilan badan dapat dijelaskan sebesar 89,3% oleh variabel independen. Hal tersebut terlihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,893. Sedangkan sebesar 10,7% variabel dependen pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Pajak Penghasilan Badan

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, maka H_1 diterima. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 3 perusahaan sub sektor transportasi memiliki nilai minimum sebesar 25,35, nilai maksimum sebesar 29,20 dan nilai rata-rata sebesar 27,59. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan perusahaan sub sektor transportasi masih terbilang tinggi karena belum menyentuh titik minus.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan yang dimiliki perusahaan, maka pajak penghasilan badan pun akan meningkat. Sehingga pajak penghasilan badan terutang akan semakin besar. Jika dilihat dalam laporan keuangannya, perusahaan jasa sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hampir semuanya memiliki pendapatan bruto diatas Rp 50 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, apabila pendapatan brutonya melebihi Rp 50 miliar maka tidak ada fasilitas pengurangan tarif dan tarif pajaknya tunggal yaitu sebesar 25%. Dengan demikian pendapatan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan, karena pendapatan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan, maka jumlah pajak penghasilan yang dibayar akan bergantung dari besar kecilnya pendapatan itu sendiri. (Republik Indonesia, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wagini, et al. (2019), Dharmayanti (2018) dan Augustine (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Pajak Penghasilan Badan

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, maka H_2 ditolak. Salah satu indikator *Debt to Equity Ratio* yaitu hutang. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 3 perusahaan sub sektor transportasi memiliki rasio hutang yang baik dan tergolong aman, karena jumlah hutangnya tidak mendekati jumlah modalnya, dimana nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum sebesar 2,62 dan nilai rata-rata sebesar 1,01. Sesuai yang dikemukakan oleh Hary (2016) bahwa kreditor lebih menyukai rasio utang yang rendah sebab dengan semakin rendahnya rasio ini maka akan semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi. Namun, disisi lain pemegang saham mungkin menginginkan rasio ini lebih tinggi karena akan memperbesar laba yang diharapkan nantinya.

Jika perusahaan melakukan pendanaan pada bank, maka akan dikenakan yang namanya beban bunga, dimana beban tersebut sebagai pengurang pendapatan yang nantinya akan berdampak pada penurunan laba perusahaan. Sehingga perusahaan lebih memilih suntikan dana dari pemegang saham/ investor guna menambah modalnya, karena baik pemegang saham/investor tidak akan membebankan bunga kepada perusahaan. Sehingga perusahaan akan terbebas dari hutang dan beban bunga. Apalagi dengan tingginya tingkat suku bunga membuat perusahaan semakin

enggan melakukan pendanaan kepada bank. Dengan demikian *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2015) bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vindasari (2019), Sholihah, et al. (2019) dan Anggraini & Kusufiyah (2020) yang menemukan bahwa *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.
2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

B. Saran

Menurunnya penerimaan pajak di tahun 2020 merupakan dampak dari krisis Covid-19 yang sudah menjadi pandemi. Bagi pelaku usaha khususnya di sektor transportasi harus berputar otak dan melakukan terobosan baru agar perusahaannya tetap bertahan, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan jasanya. Hal ini akan mempengaruhi pajak penghasilan badan nantinya, sebab ada opsi tarif pajak yang bisa dipilih berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013. Sedangkan bagi pemerintah dengan memberikan stimulus pajak guna meningkatkan kembali penerimaan pajak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. dan Y.V. Kusufiyah. 2020. Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22 (Januari) 33-47.
- Anjani, R.E. 2015. Pengaruh Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Augustine, E.C. 2017. Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur Agribisnis Tahun 2010-2015. Skripsi. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Azhari, A. 2015. Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi pada Perusahaan Penerbit Daftar Efek Syariah Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Dharmayanti, N. 2018. Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak pada PT. Jembo Cable Company Tbk. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11 (Oktober) 229-237.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gitman, L.J. dan C.J. Zutter. 2015. *Principles of Managerial Finance*. 14th ed. Singapore: Pearson Education.
- Hery. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Intergrated and Comprehensive Edition, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Keuangan RI. 2020. Menteri Keuangan Paparkan Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020. Melalui www.kemenkeu.go.id.
- Rafinska, K. 2020. Debt to Equity Ratio dan Hubungannya dalam Sektor Perpajakan. Melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/debt-to-equity-ratio>.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. 2017. *Pepajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihah, P.H.; J. Susyanti; dan B. Wahono. 2019. Pengaruh Struktur Modal, Return on Equity ROE dan Earning Per Share (EPS) terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Studi pada Persahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8 (Februari) 81-92.
- Tuanakotta, T.M. 2009. *Berfikir Kritis dalam Auditoring*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vindasari, R. 2019. Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Asset dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3 (September) 90-97.
- Wagini, D.; Andalas; dan K.C. Susena. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan dan Beban terhadap Pajak: Laba Sebelum Pajak Sebagai Variabel Intervening pada PT. Bank Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7 (Juli) 153-164.